



**KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Sayoga, SH.

11010110401044

PEMBIMBING :

Dr. Retno Saraswati, SH.MHum.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2012

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA**

Disusun Oleh :

**Sayoga, SH.
11010110401044**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 01 Oktober 2012

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

**Pembimbing
Magister Ilmu Hukum**

**Mengetahui
Ketua Program**

**Dr. Retno Saraswati, SH.MHum.
NIP. 19671119 199303 2 002**

**Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS.
NIP. 19560203 198103 1 002**

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dariNya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”**. Tesis ini penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik tentu tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH. MS selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang berkenan memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam ilmu hukum.
2. Dr. Retno Saraswati, SH. MHum selaku pembimbing yang telah dengan sabar memberikan segala petunjuk dan arahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Universitas Diponegoro yang dengan tulus dan ikhlas membimbing dan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis selama di bangku kuliah.
4. Orang tuaku yang selalu mendoakan, mendorong serta memberikan semangat, kesabaran, pengertian beserta materi yang tidak berkesudahan.
5. Adik-adikku yang secara tidak langsung selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini..

6. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu membantu dan menemani hari-hari kuliah dengan keakraban dan kekompakan.
7. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bimbingan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian sedikit kata pengantar dari penulis. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Oktober 2012

Penulis

Sayoga, SH.

NIM. 11010110401044

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Sayoga, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, Oktober 2012

Penulis

Sayoga.SH.

NIM. 11010110401044

ABSTRAK

Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler. Tapi Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral dan sumber hukum materiil dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakatnya. Kehadiran fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia menimbulkan kebingungan bagi sebagian masyarakat awam, dimana menurut sebagian masyarakat awam fatwa-fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia tersebut seakan-akan memiliki kekuatan hukum mengikat. Melihat beberapa perspektif yang hidup di Indonesia, meskipun Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga keagamaan yang dimiliki oleh umat Islam, tapi apabila fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia telah diformulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan maka dampak dari fatwa-fatwanya bersifat menyeluruh tidak hanya sebatas berdampak pada umat Islam saja. Hal tersebut membuat fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terasa menjadi kontroversional dan kontradiktif.

Permasalahan yang dibahas adalah: pertama, bagaimana kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Tata Negara Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam perspektif hukum positif. Dan ketiga, bagaimana formulasi fatwa Majelis Ulama Indonesia ke dalam hukum positif Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif kualitatif.

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, artinya Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sistem hukum nasional adalah sebagai sumber hukum materiil, dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal. Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki kekuatan hukum mengikat apabila telah diformulasikan ke dalam hukum formal peraturan perundang-undangan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah banyak yang diserap oleh regulator menjadi regulasi, tapi formula penyerapannya tergantung kebijakan regulator. Ada fatwa yang diserap secara utuh, ada pula yang diserap secara parsial, dan ada juga yang diabaikan.

Kata Kunci : Majelis Ulama Indonesia, Fatwa, Peraturan Perundang-undangan

ABSTRACT

Indonesia is not a religion state, nor a secular state. But Indonesia is a nation state that believe in the one supreme God which makes religion as the basic and source of substantive law in the implementation of state and society. The presence of Indonesian Ulama Council fatwa's cause confusion for most ordinary people, which according to most of the ordinary people of the fatwa's issued by the Indonesian Ulama Council as if it has binding legal force. Seeing some perspective living in Indonesia, although the Indonesian Ulama Council is a religious institution that is owned by muslims, but when fatwa's Indonesian Ulama Council has formulated into regulations, the impact of fatwa's is comprehensive. It makes the fatwa's issued by the Indonesian Ulama Council was a controversial and contradictory.

The issues to be writted are: the first, how the position of the Indonesian Ulama Council in the system of the state structure of Indonesia. The second, how the Indonesian Ulama Council fatwa's position in the perspective of positive law. And the third, how to formulations fatwa's Indonesian Ulama Council into positive law.

The method used in this research is the normative juridical approach, the specification research is a descriptive analytical study, using the secondary data acquired with library research. And data analysis methods used in this research is qualitative normative.

Indonesian Ulama Council is the socio political sphere, it is an Interest group institusional. The fatwa's of Indonesian Ulama Council is a source of substantive law, in the sense of being the source material for the content of formal law. The fatwa's of Indonesian Ulama Council have binding legal force if it has been formulated into a formal legal regulations. The fatwa's of Indonesian Ulama Council have many to be absorbed by the regulator to be regulations, but the formula of absorption depends on the policy regulator. There is absorbed as a whole, some are absorbed partially, and some are ignored.

Key Words : Indonesian Ulama Council, Fatwa, Regulations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Struktur Ketatanegaraan Indonesia	34
B. Sistem Hukum Nasional Indonesia	50
C. Sumber Hukum	61

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Tata Negara Indonesia	70
B. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif hukum Positif.....	87
C. Formulasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Hukum Positif Indonesia	102
 BAB IV PENUTUP	 135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN